

KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR BASIS DAN NON BASIS DALAM PEREKONOMIAN REGIONAL BALI

MADE ANTARA¹⁾

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Udayana

ABSTRACT

Implemented the law of number 32, 2004 about region government, is important moment for Bali Region Government to manage their region household, mainly to conduct reformation in various of development sectors. Decision need take in involved region autonomy is to develop the potential of basis sectors in effort to promote region economic growth and equity the result of development. Objective of the research are: (1) To identify basis sectors in economy of Bali Province, and (2) To analyze the investment need for each of basis sector that identify at point 1.

The kind of research is quantitative of regional macroeconomic, meanwhile characteristic of research is verificative-quantitative, namely to study and to explore of data and information of regional macro of Bali that sources from documents and reports that spread in various of government office. Data analyze use three methods, i.e.: (1) Location Quotient (LQ), (2) Incremental Capital Output Ratio (ICOR), and (3) Trend Linear Method.

From the result of research and discussion find the substances follows: (1) From nine sectors in Bali Province Economy, only four sectors identified as basis sectors, showed by LQ value (average 6 years) > 1, namely agricultural sector (LQ=1.18), trade, hotel and restaurant sector (LQ=1.94). Transport and communication sector (LQ=1.69), and services sector (LQ=1.56). Meanwhile five sectors are non basis sectors that showed by LQ < 1, namely: mining and quarrying sector (LQ=0.08), manufacturing industry (LQ=0.33), electricity, gas and water supply (LQ=0.91), construction sector (0.75), financial, ownership and business services (LQ=0.94); (2) Based on sectors ICOR values, target of sectors growth and gross value added of basis sectors before tth year, so can estimate need the investment each of basis sectors in Bali Province Economy, follows:

- a. Need the investment of agricultural sector period 2005-2010 in succession Rp 227660.58 million (2005); Rp 262894.10 million (2006); Rp 302217.01 million (2007); Rp 346374.04 million (2008); Rp 396235.35 million (2009), and Rp 452822.84 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 1988203.93 million or 1.988 quintillion.
- b. Need the investment of trade, hotel dan restaurant period 2005-2010 in succession Rp 133429.39 million (2005), Rp 110644.27 million (2006), Rp 87204.66 million (2007), Rp 63235.82 million (2008), Rp 38868.31 (2009) million, and Rp 14236,83 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 447619.28 million or Rp 447,619 billion.
- c. Need the investment of transport and communication sectors period 2005-2010 in succession Rp 239636.39 million (2005), Rp 277659.86 million (2006), Rp 320010.27 million (2007), Rp 367486.98 million (2008), Rp 421022.76 million (2009), and Rp 481712.02 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 2107528.29 million or Rp 2.108 quintillion.
- d. Need the investment of services sector period 2005-2010 in succession Rp 337103.91 million (2005), Rp 392065.64 million (2006), Rp 454163.76 million (2007), Rp 524787.43 million (2008), Rp 605584.36 million (2009), and Rp 698519.31 million (2010), or need the total investment during six years are Rp 3012224,40 million or Rp 3,012 quintillion.
- e. Need the total investment of four basis sectors 2005-2010 in succession Rp 937830.27 million (2005), Rp 1043263.87 million (2006), Rp 1163595.70 million (2007), Rp 1301884.27 million (2008), Rp 1461710.78 million (2009), dan Rp 1647291.00 million (2010), or need the total investment during six years is Rp 7555575.90 million or Rp 7,6 quintillion.
- f. Need the total investment for Bali economy period 2005-2010 in succession Rp 1645617.28 million (2005), Rp 1908279.94 million (2006), Rp 2222927.85 million (2007), Rp 2605284.29 million (2008), Rp 3076050.63 million (2009), dan Rp 3662854.34 million (2010), or need the total investment during six years is Rp 15121014.33 million or Rp 15,121 quintillion.

1) Pengajar pada Program Magister Agribisnis, Program Pascasarjana Universitas Udayana

- g. Based on the finding of research, so can recommended to the Government of Bali Province Cq Bali Regional Planning Institution, namely: (1) The investment resources that limited, resources from government as well as private, in order used to develop basis sectors, namely Agricultural sector mainly farm food crops, livestock and products, and fishery; Trade, hotel and restaurant sector, mainly hotel and restaurant; Transport and communication sector; and Services sector, mainly government and private services. Forth of this basis sector close linkages with the tourism that to be mover motor Bali economy'; (2) The regency government Cq Regency Regional Development Planning Office need to conduct analyze basis sector in regional economy of each. This involved with plan allocation of investment fund to basis sectors in each regency in Bali.

Key Words: Basis Sectors, Economy, Location Quotient (LQ), Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan momen penting bagi Pemerintah Daerah Bali dalam mengurus rumahtangga daerahnya, terutama dalam melakukan reformasi di berbagai bidang pembangunan. Keputusan yang perlu diambil dalam menyikapi otonomi daerah adalah mengembangkan potensi sektor-sektor basis dan menentukan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Adapun tujuan penelitian, yaitu: (1) Mengidentifikasi sektor-sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali, dan (2). Menganalisis kebutuhan investasi masing-masing sektor basis yang diidentifikasi pada butir 1.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif ekonomi makro regional yang berbasis angka-angka. Sedangkan sifat penelitian yaitu verifikatif-kuantitatif, yaitu menggunakan formula-formula ekonomi regional terhadap data makro regional Bali yang bersumber pada dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Bali. Analisis data menggunakan tiga metode yaitu: (1) *Location Quotient (LQ)*, (2) *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)*, dan (3) *Metoda Trend Linear*.

Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) Dari sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Bali, hanya empat sektor teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ (rata-rata 6 tahun) > 1 , yaitu sektor pertanian (LQ = 1,18), sektor perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 1,94), sektor pengangkutan dan komunikasi (LQ = 1,69), dan sektor jasa-jasa (LQ = 1,56). Sedangkan lima sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ < 1 , yaitu: sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,08), sektor industri pengolahan (LQ = 0,33), sektor listrik, gas dan air bersih (LQ = 0,91), sektor bangunan (LQ = 0,75), dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (LQ = 0,94). (2) Berdasarkan ICOR, target pertumbuhan dan nilai tambah bruto (PDRB) sektor-sektor basis sebelum tahun ke- t (Y_{t-1}), maka dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing **sektor basis** dalam perekonomian Provinsi Bali sebagai berikut:

- a. Kebutuhan investasi sektor pertanian periode 2005-2010 berturut-turut Rp 227660,58 juta (2005); Rp 262894,10 juta (2006); Rp 302217,01 juta (2007); Rp 346374,04 juta (2008); Rp 396235,35 juta (2009) dan Rp 452822,84 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 1988203,93 juta atau 1,988 triliun.
- b. Kebutuhan investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran periode 2005-2010 berturut-turut Rp 133429,39 juta (2005), Rp 110644,27 juta (2006), Rp 87204,66 juta (2007), Rp 63235,82 juta (2008), Rp 38868,31 (2009) juta, dan Rp 14236,83 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 447619,28 juta atau Rp 447,619 milyar.
- c. Kebutuhan investasi sektor pengangkutan dan komunikasi periode 2005-2010 berturut-turut Rp 239636,39 juta (2005), Rp 277659,86 juta (2006), Rp 320010,27 juta (2007), Rp 367486,98 juta (2008), Rp 421022,76 juta (2009), dan Rp 481712,02 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 2107528,29 juta atau Rp 2,108 triliun.
- d. Kebutuhan investasi sektor jasa-jasa periode 2005-2010 berturut-turut Rp 337103,91 juta (2005), Rp 392065,64 juta (2006), Rp 454163,76 juta (2007), Rp 524787,43 juta (2008), Rp 605584,36 juta (2009), dan Rp 698519,31 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 3012224,40 juta atau Rp 3,012 triliun.
- e. Kebutuhan investasi total empat sektor-sektor basis periode 2005-2010 berturut-turut Rp 937830,27 juta (2005), Rp 1043263,87 juta (2006), Rp 1163595,70 juta (2007), Rp 1301884,27 juta (2008), Rp 1461710,78 juta (2009), dan Rp 1647291,00 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 7555575,90 juta atau Rp 7,6 triliun.
- f. Kebutuhan investasi total untuk perekonomian Bali periode 2005-2010 berturut-turut Rp 1645617,28 juta (2005), Rp 1908279,94 juta (2006), Rp 2222927,85 juta (2007), Rp 2605284,29 juta (2008), Rp 3076050,63 juta (2009), dan Rp 3662854,34 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 15121014,33 juta, atau Rp 15,121 triliun.

Dari hasil temuan penelitian, maka dapat direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi Bali Cq. Bappeda Bali, yaitu: (1) Sumberdaya investasi yang terbatas, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta, agar dialokasikan mengembangkan sektor-sektor basis, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, terutama subsektor tanaman pangan, peternakan dan perikanan; Sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutama subsektor hotel dan subsektor restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa terutama jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Keempat sektor basis ini terkait erat dengan pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian Bali; (2) Pemerintah Kabupaten Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Bali perlu melakukan analisis sektor-sektor basis dalam perekonomian daerah masing-masing. Ini berkaitan dengan rencana alokasi sumberdaya investasi Pemerintah Provinsi Bali ke sektor-sektor basis di setiap kabupaten di Bali.

Kata Kunci: Sektor Basis, Perekonomian, Location Quotient (LQ), Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur perekonomian Bali mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pilar-pilar ekonomi yang dibangun lewat keunggulan industri pariwisata sebagai sektor pemimpin (*Leading Sector*), telah membuka beragam peluang yang dapat mendorong aktivitas ekonomi serta pengembangan etos kerja masyarakat. Dimensi itu tergambar dari meluasnya kesempatan kerja, tingginya peluang tingkat pendapatan masyarakat, luasnya jaringan kerja yang meliputi batas-batas lokal sampai tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Dengan dukungan industri pariwisata yang sangat besar itu telah menyebabkan sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan langsung seperti perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Bali.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) strukturnya disusun oleh sembilan sektor, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan-persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Dalam bidang ekonomi regional yang merupakan sempalan ekonomi makro regional, melalui berbagai metode analisis yang dimiliki oleh bidang ilmu ini, mampu mengidentifikasi sektor-sektor basis dan non basis dalam perekonomian regional atau nasional.

Pengertian sektor basis atau unggulan pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor

dikatakan basis atau unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis atau unggulan, maka sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain. Sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut dari daerah lain.

Namun demikian dalam usaha mengembangkan sektor-sektor basis yang ditetapkan atau diidentifikasi tentu diperlukan sumber pembiayaan atau investasi yang cukup, terlebih lagi di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan tahun 1997 dan kondisi perekonomian Bali pasca Bom Kuta yang belum sepenuhnya pulih, maka analisis yang cermat menyangkut kebutuhan investasi untuk sektor-sektor basis tersebut sangat perlu dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian "Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Bali".

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya penelitian, tujuan penelitian antara lain:

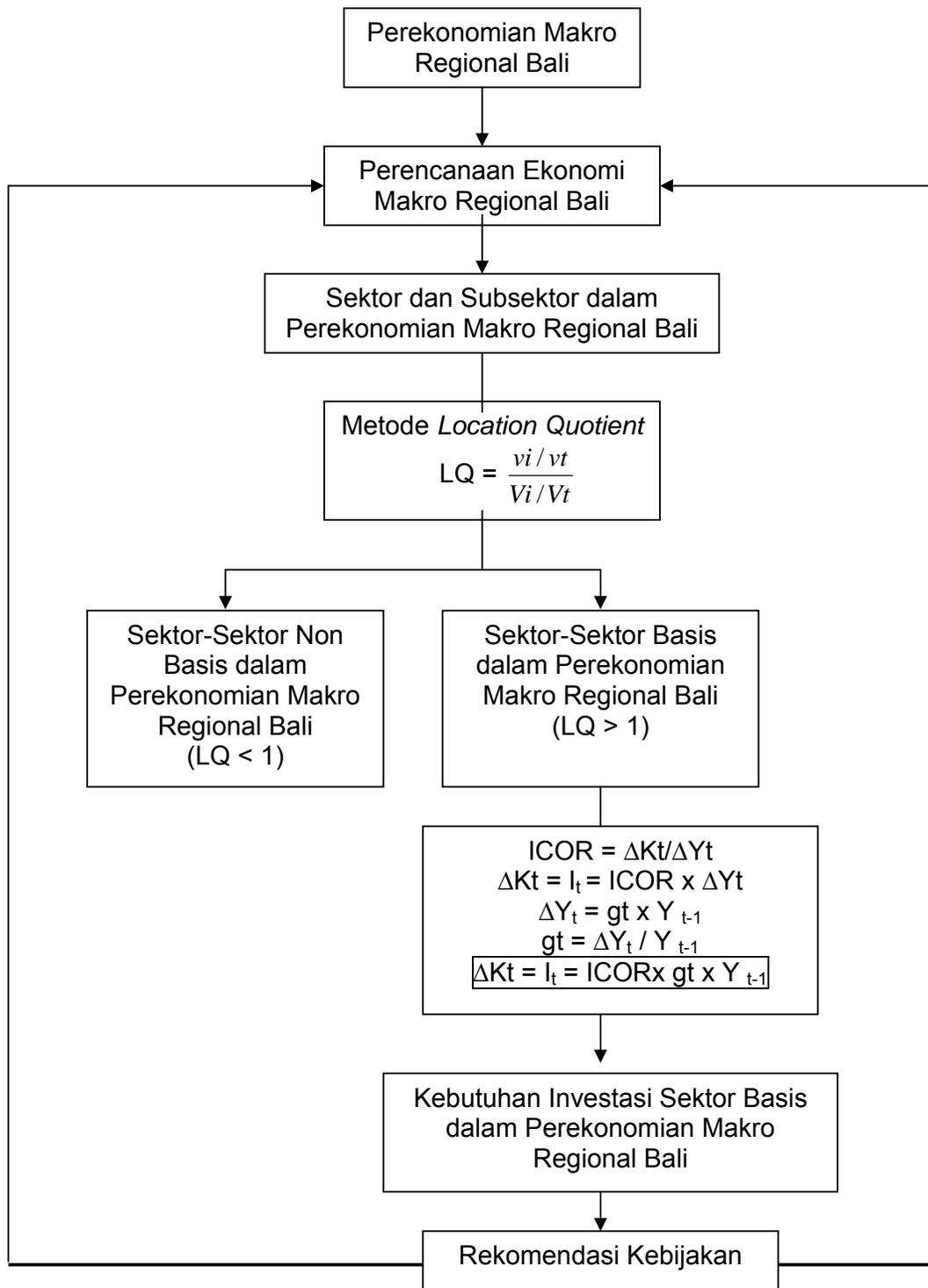
1. Mengidentifikasi sektor-sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali.
2. Menganalisis besarnya kebutuhan investasi masing-masing sektor basis yang diidentifikasi pada butir 1.

1.3. Kerangka Pemikiran Teoritik

Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah adalah suatu tonggak sejarah mengawali kewenangan pemerintah daerah mengatur rumahtangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, berarti pemerintah daerah dapat mendorong atau mempercepat tercapainya kemakmuran masyarakat melalui perencanaan ekonomi makro dan mikro secara matang dan cermat.

Pemerintah daerah Bali dalam mengelola perekonomian makro regional seperti yang ditargetkan, harus melakukan perencanaan ekonomi makro regional secara baik dan benar, agar alokasi sumber daya yang terbatas (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan manusia) menjadi efisien. Namun perlu

diketahui bahwa suatu perekonomian terdiri dari sektor basis dan sektor non basis. Menurut teori ekonomi makro regional, sektor basis (unggulan) inilah yang memiliki potensi dikembangkan, karena akan mampu menghasilkan surplus kepada daerah dari keunggulan sumberdaya (endowment) yang dimiliki. Untuk mengidentifikasi sektor basis dalam suatu perekonomian dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan analisis *Location Quotient* (LQ), yaitu **perbandingan antara peranan relatif sektor atau subsektor regional terhadap nilai tambah total regional PDRB) dengan peranan relatif sektor atau subsektor yang sama di tingkat nasional dengan nilai tambah total nasional (PDB)**. Jika $LQ > 1$ berarti sektor atau subktor tersebut adalah sektor basis. Sebaliknya jika $LQ < 1$ berarti sektor tersebut adalah sektor non basis. Jika telah mampu diidentifikasi sektor-sektor basis dalam perekonomian Bali, maka dengan menggunakan formula Incremental Capital Output Ratio ($ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$), maka akan dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dan non basis tersebut. Dari hasil analisis ini akhirnya akan dapat diambil suatu rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah Bali (Gambar 1.1).



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Teoritik "Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Bali"

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif ekonomi makro regional yang berbasis angka-angka. Sedangkan sifat penelitian yaitu verifikatif-kuantitatif, yaitu menggunakan formula-formula ekonomi regional terhadap data makro regional Bali yang bersumber pada dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Bali. Dengan demikian tidak dikenal istilah populasi dan pengambilan sampel seperti halnya penelitian-penelitian bersifat mikro yang bertumpu pada data primer tingkat lapang.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Bali, didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Perekonomian Provinsi Bali sangat unik dibandingkan dengan provinsi lainnya, karena banyak sektor terkait dengan pariwisata, (2) Belum diketahuinya sektor-sektor basis dalam perekonomian Bali, dan (3) Belum pernah dilakukan penelitian serupa.

2.3. Sumber, Jenis, dan Metode Pengumpulan Data

- a. **Sumber Data.** Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah data sekunder bersifat makro regional Bali, yang bersumber dari beberapa instansi pemerintah, antara lain: Bappeda Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Dinas-Dinas Teknis Lingkup Pemkab Bali dan lain-lain.
- b. **Jenis data.** Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat makro, antara lain: Produk Domestik Bruto Indonesia secara time series, Produk Domestik regional Bruto Provinsi Bali secara time series, target-target pertumbuhan ekonomi Bali, ICOR pada perekonomian Provinsi Bali, dll.
- c. **Metode Pengumpulan Data.** Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi dokumentasi yakni mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan tahunan yang tersebar di berbagai instansi Pemerintah Provinsi Bali

2.4. Metode Analisis

1. Location Quotient (LQ)

Metode *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sektor basis atau sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Bali, mengacu pada pada formula Hoover (1975: 147), Azis (1994: 154); Bendavid-Val

(1991). Prinsip metode analisis ini adalah membandingkan persentase sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB Provinsi Bali dengan persentase sumbangan sektor yang sama pada PNB Indonesia. Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

Dimana :

LQ = Location Quotient

v_i = Nilai tambah sektor i di Provinsi Bali

v_t = Nilai tambah total di Provinsi Bali

V_i = Nilai tambah sektor i nasional

V_t = Nilai tambah total nasional

Kriterianya adalah :

1. Jika $LQ > 1$ menunjukkan sektor ke- i di Provinsi Bali tergolong sektor basis, atau sektor i di Propinsi Bali lebih spesialis dari pada sektor yang sama di Indonesia.
2. Jika $LQ < 1$ menunjukkan sektor ke- i di Provinsi Bali tergolong sektor non basis, atau sektor i di Propinsi Bali kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Indonesia.
3. Jika $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sektor i di Provinsi Bali, atau sektor i di Propinsi Bali memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama di Indonesia.

2. Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

Metode Incremental Capital Output Ratio (ICOR) digunakan menentukan kebutuhan tambahan kapital atau investasi sektor-sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Provinsi Bali. Formula yang digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi, mengacu pada Kadariah (1981: 27) dan Arsyad (1999: 233-251), yaitu:

$$\begin{aligned} ICOR &= \Delta K_t / \Delta Y_t \\ \Delta K_t &= I_t = ICOR \times \Delta Y_t \\ \Delta Y_t &= g_t \times Y_{t-1} \\ g_t &= \Delta Y_t / Y_{t-1} \\ \text{Jadi: } \Delta K_t &= I_t = ICOR \times g_t \times Y_{t-1} \end{aligned}$$

di mana:

ICOR = Rasio penambahan modal dan output (Incremental Capital Output Ratio, ICOR) (umumnya ICOR sektor pertanian 3, sektor industri 5 dan sektor jasa 5)

$\Delta K_i = I_t$ = Tambahan kapital/modal untuk investasi sektor ke-i tahun ke-t,

ΔY_t = Tambahan nilai tambah atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t akibat adanya pertumbuhan ekonomi tahun ke-t,

Y_{t-1} = nilai tambah bruto atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t-1,

g_t = Pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t atau target pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t.

3. *Trend Linear*

Proyeksi target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) suatu sektor periode 2004-2010 sebagai jangka waktu perencanaan menggunakan metode *Trend Linear*, dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \bar{Y} - b \bar{X}$$

di mana:

Y = pertumbuhan ekonomi periode 1997-2003

X = tahun 1997-2001

a = intersep

b = koefisien regresi atau pengaruh variabel X terhadap Y

e = error term

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Regional Bali

Sebelum melakukan perhitungan kebutuhan investasi sektor basis dan non basis, terlebih dahulu dilakukan identifikasi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Bali. Identifikasi penting dilakukan sebagai dasar perencanaan alokasi sumberdaya investasi, karena sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi

untuk dikembangkan yang akan mendatangkan tambahan pendapatan atau devisa dari ekspor kelebihan produk yang dihasilkan oleh sektor basis tersebut setelah terpenuhi kebutuhannya sendiri. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan formula *Location Quotient* (LQ), yakni membandingkan secara relatif nilai tambah suatu sektor (PDRB sektor) terhadap nilai tambah total (PDRB Bali) dengan nilai tambah sektor yang sama (PDRB sektor Indonesia) terhadap nilai tambah total nasional (PDB Indonesia).

Hasil identifikasi menemukan bahwa secara umum perekonomian Bali mampu swasembada yang ditunjukkan oleh nilai LQ sebesar 1 (satu). Artinya secara umum perekonomian Bali mampu memenuhi segala kebutuhannya dari produksi sendiri (lihat tabel 3.1). Temuan ini memang kontradiktif dengan realita, karenanya perlu dilacak per sektor atau subsektor, yakni sektor-sektor atau subsektor yang menjadi sektor basis dan non basis. Identifikasi per sektor atau subsektor ditemukan bahwa dari sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Bali, hanya empat sektor adalah sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ (rata-rata 6 tahun) > 1 . Sektor-sektor tersebut yaitu: sektor pertanian (LQ = 1,18), sektor perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 1,94), sektor pengangkutan dan komunikasi (LQ = 1,69), dan sektor jasa-jasa (LQ = 1,56). Sedangkan lima sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ < 1 , yaitu: sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,08), sektor industri pengolahan (LQ = 0,33), sektor listrik, gas dan air bersih (LQ = 0,91), sektor bangunan (LQ = 0,75), dan sektor keuangan persewaan bangunan dan jasa perusahaan (LQ = 0,94)(tabel 3.1). Secara umum dapat pula diartikan bahwa sektor-sektor basis, tidak hanya mampu berproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga mampu memasok daerah lain. Sedangkan sektor-sektor non basis berarti Provinsi Bali mendatangkan produk untuk memenuhi kebutuhan penduduk Provinsi Bali dari daerah lain.

Tabel 3.1
Sektor-Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Provinsi Bali, 1997-2003

No	Lapangan Usaha	Location Quotient (LQ)							Kriteria
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	Rata-rata	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.18	1.14	1.16	1.18	1.20	1.22	1.18	Basis
	a. Tanaman Bahan Makanan	1.30	1.28	1.30	1.32	1.34	1.39	1.32	Basis
	b. Tanaman Perkebunan	0.48	0.30	0.33	0.41	0.46	0.43	0.40	Non Basis
	c. Peternakan dan Hasil- Hasilnya	2.93	2.76	2.76	2.74	2.74	2.71	2.77	Basis
	d. Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non Basis
	e. Perikanan	1.20	1.15	1.15	1.15	1.17	1.30	1.19	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	Non Basis
	a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non Basis
	b. Pertambangan tanpa Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non Basis
	c. Penggalian	0.63	0.65	0.63	0.61	0.59	0.56	0.61	Non Basis
3	Industri Pengolahan	0.33	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	Non Basis
	a. Industri Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non Basis
	b. Industri Tanpa Migas	0.37	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	Non Basis
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.87	0.84	0.88	0.91	0.98	0.94	0.91	Non Basis
	a. Listrik	0.74	0.73	0.79	0.82	0.91	0.87	0.81	Non Basis
	b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Non Basis
	c. Air Bersih	1.85	1.74	1.73	1.72	1.75	1.65	1.74	Basis
5	Bangunan	0.76	0.77	0.75	0.74	0.76	0.75	0.75	Non Basis
6	Perdagangan, Hotel dan Rest	1.97	2.00	1.98	1.93	1.88	1.90	1.94	Basis
	a. Perdag Besar dan Eceran	0.78	0.79	0.77	0.75	0.74	0.79	0.77	Non Basis
	b. Hotel	19.52	19.16	19.64	19.43	18.67	18.25	19.11	Basis
	c. Restoran	3.34	3.33	3.30	3.21	3.19	3.14	3.25	Basis
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.73	1.76	1.75	1.72	1.66	1.51	1.69	Basis
	a. Pengangkutan	2.01	2.06	2.04	2.01	1.99	1.81	1.99	Basis
	b. Komunikasi	0.86	0.94	0.97	1.00	0.93	0.87	0.93	Non Basis
8	Keuangan Persew dan Jasa Persh	0.87	0.95	0.95	0.95	0.96	0.95	0.94	Non Basis
	a. Bank	0.95	1.06	1.05	1.03	1.03	1.04	1.03	Basis
	b. Lembaga Keuangan bukan bank	0.78	0.84	0.83	0.84	0.90	0.93	0.85	Non Basis
	c. Jasa Penunjang Keuangan	3.13	3.49	3.51	3.59	3.70	3.87	3.55	Basis
	d. Sewa Bangunan	1.07	1.17	1.20	1.21	1.20	1.17	1.17	Basis
	e. Jasa Perusahaan	0.36	0.37	0.37	0.36	0.37	0.35	0.36	Non Basis
9	J a s a - j a s a	1.51	1.51	1.54	1.56	1.60	1.61	1.56	Basis
	a. Pemerintahan Umum	1.39	1.40	1.44	1.46	1.52	1.58	1.46	Basis
	b. Swasta	1.69	1.69	1.69	1.71	1.71	1.64	1.69	Basis
	PDRB	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Basis

Sumber: Dihitung berdasarkan PDRB Bali dan PDB Indonesia atas dasar harga konstan
Perhitungan LQ menggunakan formula, yaitu:

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \text{ atau } LQ = \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t}$$

Di mana: LQ = Location Quotient; v_i = Nilai tambah sektor i di Provinsi Bali; v_t = Nilai tambah total di Provinsi Bali; V_i = Nilai tambah sektor i nasional; dan V_t = Nilai tambah total nasional

Kriterianya adalah :

1. Jika $LQ > 1$ menunjukkan sektor ke-i di Provinsi Bali tergolong sektor basis, atau sektor i di Propinsi Bali lebih spesialis dari pada sektor yang sama di Indonesia.
2. Jika $LQ < 1$ menunjukkan sektor ke-i di Provinsi Bali tergolong sektor non basis, atau sektor i di Propinsi Bali kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Indonesia.
3. Jika $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sektor i di Provinsi Bali, atau sektor i di Propinsi Bali memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama di Indonesia.

3.2. Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Regional Bali

3.2.1. Determinan Kebutuhan Investasi Sektor Ekonomi

Dalam perhitungan kebutuhan investasi sektor basis (juga sektor non basis), ada tiga determinan utama yang menentukan besarnya kecilnya kebutuhan investasi atau tambahan modal setiap tahun, yaitu: (1) rasio tambahan kapital dan output (*Incremental Capital Output Ratio*, ICOR) suatu sektor, (2) target pertumbuhan sektor yang direncanakan tahun ke-t (gt), dan (3) nilai tambah bruto (PDRB) sektor sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}). Jika ketiganya diungkapkan dalam bentuk formula matematika sederhana, sbb.:

$$ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$$

$$\Delta K_t = I_t = ICOR \times \Delta Y_t$$

$$\Delta Y_t = gt \times Y_{t-1}$$

$$gt = \Delta Y_t / Y_{t-1}$$

$$\text{Jadi } \Delta K_t = I_t = ICOR \times gt \times Y_{t-1}$$

(1) (2) (3)

Dalam realitanya, tidak semua investasi tahun ke-t menghasilkan output (nilai tambah bruto) pada tahun ke-t, karena ada beberapa sifat investasi yang membutuhkan tenggang waktu (*time lag*) mulai awal investasi sampai mampu memproduksi. Misal, investasi bidang perkebunan. Namun untuk memudahkan dan menyederhanakan perhitungan kebutuhan investasi atau tambahan modal tahun ke-t ($\Delta K_t = I_t$), maka formula: $ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$, mengasumsikan bahwa sebagian besar investasi tahun ke-t tersebut mampu menghasilkan tambahan nilai tambah bruto pada tahun ke-t (ΔY_t) juga, atau dengan kata lain tambahan nilai tambah bruto tahun ke-t (ΔY_t) dihasilkan sebagian besar oleh investasi tahun ke-t ($\Delta K_t = I_t$) dan sebagian kecil mungkin dihasilkan oleh investasi tahun-tahun sebelumnya ($\Delta K_{t-n} = I_{t-n}$). Sedangkan pembagian tambahan nilai tambah bruto tahun ke-t (ΔY_t) oleh nilai tambah bruto sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}) akan diperoleh pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan sektor tahun ke-t (gt). Jadi berdasarkan formula ICOR, secara sederhana dapatlah dipandang ada korelasi positif antara kebutuhan investasi tahun ke-t (I_t) dengan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t (gt) atau tambahan nilai tambah bruto yang dihasilkan sebelum tahun ke-t (ΔY_{t-1}).

3.2.2. Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis: Skenario-1

Skenario-1 menggunakan asumsi sebagai berikut:

$$\Delta K_t = I_t = ICOR \times gt \times Y_{t-1}$$

(1) (2) (3)

1. ICOR sektor pertanian, industri dan jasa masing-masing 3, 5 dan 5;
2. Target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi (gt) yang direncanakan periode 2004-2010, baik untuk sektor basis maupun sektor non basis didasarkan atas *trend linear* (tabel 3.3).

Tabel 3.3
Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2010 (%)
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4.05	4.53	5.00	5.48	5.95	6.43	6.90	5.48
2	Pertambangan dan Penggalian	3.15	3.58	4.01	4.44	4.88	5.31	5.74	4.44
3	Industri Pengolahan	4.00	4.21	4.43	4.64	4.86	5.07	5.29	4.64
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.77	3.21	2.65	2.09	1.53	0.98	0.42	2.09
5	Bangunan	7.25	8.71	10.17	11.64	13.10	14.56	16.03	11.64
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.24	1.05	0.86	0.67	0.48	0.30	0.11	0.67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.88	4.36	4.84	5.32	5.80	6.28	6.76	5.32
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.97	10.68	12.39	14.11	15.82	17.53	19.25	14.11
9	J a s a - j a s a	4.63	5.17	5.72	6.27	6.82	7.36	7.91	6.27
	PDRB	3.74	4.17	4.64	5.16	5.74	6.39	7.13	5.28

Catatan:

1. Cetak tebal = sektor basis
2. Proyeksi target pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air Minum diatur sedemikian rupa walau pertumbuhannya cenderung menurun sampai 2010, tetapi tetap positif.
3. Proyeksi target pertumbuhan sektor basis dan non basis menggunakan metode *Trend Linear*, berdasarkan data pertumbuhan sektor-sektor ekonomi deret waktu 1997-2003

3. Proyeksi Nilai Tambah Bruto (PDRB) sektor-sektor ekonomi sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}), baik sektor basis maupun non basis didasarkan atas *trend linear*.

Dari proyeksi nilai tambah sektor-sektor ekonomi (Y_{it}) berdasarkan *trend linear*, baik basis maupun non basis periode 2004-2009, akan diperoleh nilai tambah sektor sebelum tahun ke-t ($Y_{i,t-1}$) atau pertambahan nilai tambah setiap sektor ekonomi (ΔY_{it}) pada tahun ke-t (tabel 3.4 dan tabel 3.5).

Dari hasil perkalian ketiga determinan yang masing-masing telah diasumsikan sebelumnya, maka diperoleh hasil perhitungan kebutuhan investasi setiap sektor-sektor basis dan juga sektor non basis dalam perekonomian Provinsi Bali seperti disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.4
Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali Atas Dasar Harga Konstan 1993,
Tahun 2004-2010 (juta rupiah)
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1675724.54	1751611.40	1839242.76	1939981.77	2055439.78	2187518.23	2338459.18
2	Pertambangan dan Penggalian	61313.52	63507.81	66055.55	68991.46	72356.52	76198.94	80575.27
3	Industri Pengolahan	750150.34	781741.42	816346.77	854242.40	895737.23	941177.08	990949.35
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	147646.04	152384.00	156423.40	159696.72	162147.10	163729.98	164414.37
5	Bangunan	409494.77	445168.31	490461.96	547538.98	619268.23	709453.50	823151.23
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2547334.62	2574020.50	2596149.36	2613590.29	2626237.45	2634011.11	2636858.48
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1099451.23	1147378.51	1202910.48	1266912.53	1340409.93	1424614.48	1520956.89
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	630751.95	698112.48	784629.56	895314.11	1036954.60	1218772.14	1453354.09
9	J a s a - j a s a	1303270.35	1370691.13	1449104.25	1539937.01	1644894.49	1766011.37	1905715.23
	PDRB	8625137.36	8984615.56	9401324.09	9886205.27	10453445.33	11121486.84	11914434.08

Catatan:

1. Proyeksi menggunakan asumsi-asumsi skenario-1
2. Cetak tebal = sektor basis

Tabel 3.5
Proyeksi Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali Atas Dasar Harga Konstan 1993,
Tahun 2004-2010 (juta rupiah)
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	65291.78	75886.86	87631.37	100739.00	115458.01	132078.45	150940.95
2	Pertambangan dan Penggalian	1870.03	2194.29	2547.74	2935.91	3365.06	3842.42	4376.33
3	Industri Pengolahan	28823.50	31591.08	34605.35	37895.63	41494.82	45439.85	49772.27
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5360.19	4737.96	4039.40	3273.32	2450.39	1582.88	684.39
5	Bangunan	27676.84	35673.55	45293.65	57077.02	71729.25	90185.27	113697.73
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	31088.22	26685.88	22128.85	17440.93	12647.16	7773.66	2847.37
7	Pengangkutan dan Komunikasi	41050.09	47927.28	55531.97	64002.05	73497.40	84204.55	96342.40
8	Keuangan Persew dan Jasa Perusahaan	51898.81	67360.52	86517.08	110684.55	141640.48	181817.54	234581.95
9	J a s a - j a s a	57620.05	67420.78	78413.13	90832.75	104957.49	121116.87	139703.86
	PDRB	310679.51	359478.20	416708.54	484881.17	567240.06	668041.51	792947.25

Sumber : Diolah dari Tabel 4.4.

Catatan: Cetak Tebal = Sektotr Basis

Tabel 3.6
Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali, 2004-2010
(Skenario-1)

No	Lapangan Usaha	Kriteria	Proyeksi Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis (Juta Rupiah)						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	Basis	227660.58	262894.10	302217.01	346374.04	396235.35	452822.84	1988203.93
2	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Basis	133429.39	110644.27	87204.66	63235.82	38868.31	14236.83	447619.28
3	Pengangkutan dan Komunikasi	Basis	239636.39	277659.86	320010.27	367486.98	421022.76	481712.02	2107528.29
4	J a s a - j a s a	Basis	337103.91	392065.64	454163.76	524787.43	605584.36	698519.31	3012224.40
	Sub Total Kebutuhan Investasi Sektor Basis		937830.27	1043263.87	1163595.70	1301884.27	1461710.78	1647291.00	7555575.90
5	Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	10971.44	12738.71	14679.53	16825.29	19212.10	21881.67	96308.74
6	Industri Pengolahan	Non Basis	157955.41	173026.74	189478.17	207474.12	227199.27	248861.34	1203995.04
7	Listrik, Gas dan Air Bersih	Non Basis	23689.81	20196.98	16366.58	12251.93	7914.40	3421.96	83841.65
8	Bangunan	Non Basis	178367.73	226468.25	285385.10	358646.25	450926.36	568488.64	2068282.32
9	Keuangan Persew dan Jasa Persh	Non Basis	336802.62	432585.40	553422.77	708202.42	909087.72	1172909.74	4113010.67
	Sub Total Kebutuhan Investasi Sektor Non Basis		707787.01	865016.08	1059332.15	1303400.01	1614339.85	2015563.35	7565438.42
	Total Kebutuhan Investasi Bali		1645617.28	1908279.94	2222927.85	2605284.29	3076050.63	3662854.34	15121014.33
	a. Pemerintah (40%)		658246.91	763311.98	889171.14	1042113.72	1230420.25	1465141.73	6048405.73
	b. Swasta (60%)		987370.37	1144967.97	1333756.71	1563170.57	1845630.38	2197712.60	9072608.60

Catatan: Sebagai perbandingan, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Investasi) di Provinsi Bali tahun 2003 atas harga konstan tahun 1993 sebesar Rp 1368165.68 juta
No 1-4 adalah sektor basis
No 5-9 adalah sektor non basis

3.2.3. Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis: Skenario-2

Skenario-2 menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

$$\Delta K_t = I_t = \text{ICOR} \times g_t \times Y_{t-1}$$

(1) (2) (3)

1. ICOR sektor pertanian, industri dan jasa berturut-turut 3, 5 dan 5;
2. Target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi (gt) yang direncanakan periode 2004-2010, untuk sektor basis didasarkan atas target optimistik (lebih tinggi dari pada target *trend linear* pada skenario-1), sedangkan untuk sektor non basis didasarkan atas *trend linear* (tabel 3.7);

Tabel 3.7
Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2010 (%) (Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-Rata
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	6.50
2	Pertambangan dan Penggalian	3.15	3.58	4.01	4.44	4.88	5.31	5.74	4.44
3	Industri Pengolahan	4.00	4.21	4.43	4.64	4.86	5.07	5.29	4.64
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.77	3.21	2.65	2.09	1.53	0.98	0.42	2.09
5	Bangunan	7.25	8.71	10.17	11.64	13.10	14.56	16.03	11.64
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	4.50
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	6.00
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.97	10.68	12.39	14.11	15.82	17.53	19.25	14.11
9	J a s a - j a s a	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	6.50
	PDRB	4.59	5.20	5.84	6.50	7.18	7.91	8.69	6.56

Catatan:

1. Cetak tebal = Sektor Basis
2. Proyeksi pertumbuhan sektor Listrik, Gas dan Air Minum diatur sedemikian rupa walau pertumbuhannya cenderung menurun sampai 2010, tetapi tetap positif.
3. Pertumbuhan sektor basis didasarkan atas target optimistik (lebih tinggi dari pada target *Trend Linear*), sedangkan sektor non basis didasarkan atas metode *Trend Linear* menggunakan basis data deret waktu 1997-2003.

3. Nilai tambah (PDRB) sektor-sektor ekonomi sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}), baik untuk sektor basis maupun sektor non basis mengikuti asumsi 2, sehingga dari hasil perhitungan diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 3.8 dan 3.9.

Asumsi 2 menimbulkan implikasi pada asumsi 3 yang membedakan skenario-1 dan skenario-2. Asumsi 2 pada skenario 2, target-target pertumbuhan sektor basis dibuat atau sengaja dipasang lebih tinggi dengan interval teratur, sedangkan sektor-sektor non basis mengikuti *trend linear* sama seperti skenario-1. Asumsi 2 pada skenario 2 menghasilkan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) sektor basis sebelum tahun ke-t lebih tinggi dari pada proyeksi nilai tambah bruto sektor basis sebelum tahun ke-t pada skenario-1 (bandingkan tabel 3.4 dan tabel 3.8). Perbedaan ini akhirnya menghasilkan perhitungan kebutuhan investasi yang berbeda, dimana kebutuhan investasi sektor basis dan total investasi pada skenario-2 lebih tinggi dari pada skenario-1.

Dari asumsi-asumsi pada skenario-2 kemudian dilanjutkan dengan perhitungan, maka akan diperoleh kebutuhan investasi atau tambahan modal per tahun pada periode perencanaan 2005-2010, seperti disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.8
Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali Atas Dasar Harga Konstan 1993,
Tahun 2004-2010 (juta rupiah)
(Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1690954.40	1783956.89	1890994.30	2013908.93	2154882.56	2316498.75	2501818.65
2	Pertambangan dan Penggalian	61313.52	63507.81	66055.55	68991.46	72356.52	76198.94	80575.27
3	Industri Pengolahan	750150.34	781741.42	816346.77	854242.40	895737.23	941177.08	990949.35
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	147646.04	152384.00	156423.40	159696.72	162147.10	163729.98	164414.37
5	Bangunan	409494.77	445168.31	490461.96	547538.98	619268.23	709453.50	823151.23
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2591733.79	2682444.47	2789742.25	2915280.66	3061044.69	3229402.15	3423166.27
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1106029.19	1161330.65	1225203.84	1298716.07	1383132.61	1479951.89	1590948.29
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	630751.95	698112.48	784629.56	895314.11	1036954.60	1218772.14	1453354.09
9	J a s a - j a s a	1307932.82	1379869.12	1462661.27	1557734.25	1666775.65	1791783.82	1935126.53
	PDRB	8696006.82	9148515.16	9682518.90	10311423.57	11052299.18	11926968.25	12963504.05

Catatan:

1. Proyeksi menggunakan asumsi-asumsi skenario-2
2. Cetak tebal = sektor basis

Tabel 3.9
Proyeksi Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Bali Atas Dasar Harga Konstan 1993,
Tahun 2004-2010 (juta rupiah)
(skenario-2)

No	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	80521.64	93002.49	107037.41	122914.63	140973.63	161616.19	185319.90
2	Pertambangan dan Penggalian	1870.03	2194.29	2547.74	2935.91	3365.06	3842.42	4376.33
3	Industri Pengolahan	28823.50	31591.08	34605.35	37895.63	41494.82	45439.85	49772.27
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5360.19	4737.96	4039.40	3273.32	2450.39	1582.88	684.39
5	Bangunan	27676.84	35673.55	45293.65	57077.02	71729.25	90185.27	113697.73
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	75487.39	90710.68	107297.78	125538.40	145764.03	168357.46	193764.13
7	Pengangkutan dan Komunikasi	47628.05	55301.46	63873.19	73512.23	84416.54	96819.28	110996.39
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	51898.81	67360.52	86517.08	110684.55	141640.48	181817.54	234581.95
9	J a s a - j a s a	62282.51	71936.30	82792.15	95072.98	109041.40	125008.17	143342.71
	PDRB	381548.97	452508.34	534003.74	628904.67	740875.60	874669.08	1036535.80

Sumber : Diolah dari Tabel 4.8.

Catatan: Cetak Tebal = Sektor Basis

Tabel 3.10
Kebutuhan Investasi Sektor Basis dan Non Basis dalam Perekonomian Provinsi Bali, 2004-2010
(Skenario-2)

No	Lapangan Usaha	Kriteria	Proyeksi Kebutuhan Investasi Sektor Basis (Juta Rupiah)						Total
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	Basis	279007.48	321112.24	368743.89	422920.88	484848.58	555959.70	2432592.76
2	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Basis	453553.41	536488.89	627692.01	728820.16	841787.29	968820.64	4157162.41
3	Pengangkutan dan Komunikasi	Basis	276507.30	319365.93	367561.15	422082.72	484096.41	554981.96	2424595.47
4	J a s a - j a s a	Basis	359681.52	413960.74	475364.91	545206.99	625040.87	716713.53	3135968.55
	Sub Total Kebutuhan Investasi Sektor Basis		1368749.71	1590927.8	1839361.96	2119030.75	2435773.15	2796475.83	12150319.19
5	Pertambangan dan Penggalian	Non Basis	10971.44	12738.71	14679.53	16825.29	19212.10	21881.67	96308.74
6	Industri Pengolahan	Non Basis	157955.41	173026.74	189478.17	207474.12	227199.27	248861.34	1203995.04
7	Listrik, Gas dan Air Bersih	Non Basis	23689.81	20196.98	16366.58	12251.93	7914.40	3421.96	83841.65
8	Bangunan	Non Basis	178367.73	226468.25	285385.10	358646.25	450926.36	568488.64	2068282.32
9	Keuangan Persew dan Jasa Persh	Non Basis	336802.62	432585.40	553422.77	708202.42	909087.72	1172909.74	4113010.67
	Sub Total Kebutuhan Investasi Sektor Non Basis		707787.01	865016.08	1059332.15	1303400.01	1614339.85	2015563.35	7565438.42
	Total Kebutuhan Investasi Bali		2076536.72	2455943.87	2898694.10	3422430.76	4050113.00	4812039.18	19715757.63
	a. Pemerintah (40%)		830614.69	982377.55	1159477.64	1368972.30	1620045.20	1924815.67	7886303.05
	b. Swasta (60%)		1245922.03	1473566.32	1739216.46	2053458.46	2430067.80	2887223.51	11829454.58

Catatan: Sebagai perbandingan, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Investasi) di Provinsi Bali tahun 2003 atas harga konstan tahun 1993 sebesar Rp 1.368.165,68 juta
 No 1-4 adalah sektor basis
 No 5-9 adalah sektor non basis

3.2.4. Pembahasan

3.2.4.1. Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Jika diperbandingkan antara skenario-1 dan skenario-2 tampak bahwa target pertumbuhan sektor pertanian pada skenario-2 lebih tinggi dari pada skenario-1, dan ini akan membawa implikasi terhadap kebutuhan investasi, dan jika kebutuhan investasi terpenuhi dan benar-benar terealisasi, maka akan membawa konsekuensi berupa peningkatan nilai tambah bruto atau output sektor pertanian pada tahun ke-t+n. Mungkin muncul pertanyaan, kebutuhan dana investasi sektor basis pertanian pada tahun ke-t harus dialokasikan ke subsektor mana, karena suatu sektor terdiri atas sub-subsektor, dan ke kabupaten mana karena wilayah Bali sudah terkapling-kapling menjadi wilayah Pemerintah Kabupaten?. Dalam pengkajian ini memang tidak dilakukan pemecahan perhitungan (*Breakdown Accounting*) kebutuhan investasi sampai ke tingkat subsektor basis dan tingkat kabupaten, dengan pertimbangan perhitungan sangat rumit dan walaupun diperoleh besaran angka sifatnya sangat relatif dan kurang fleksibel. Agar ada fleksibilitas dalam alokasi dana investasi oleh para perencana pembangunan di tingkat provinsi, maka perhitungan kebutuhan dana investasi tingkat sektor cukup memadai.

Jawaban dari dua pertanyaan di atas, yakni: (i) Alokasi dana investasi suatu sektor dapat diprioritaskan ke subsektor basis dan jika dalam sektor tersebut terdapat lebih dari satu subsektor basis, maka alokasinya dipertimbangkan secara merata atau ada prioritas-prioritas berdasarkan pertimbangan si perencana, seperti potensi subsektor, prospek pemasaran produk (domestik atau ekspor), penyerapan tenagakerja, ketersediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, pelabuhan, listrik, air minum, peraturan-peraturan investasi termasuk prosedur pengurusan izin di tiap kabupaten, dll.; (ii) Alokasi dana investasi suatu sektor basis dapat diprioritaskan ke kabupaten yang memiliki sektor basis yang sama dengan provinsi, sehingga dana investasi menjadi tepat guna pada sektor potensial dan pemanfaatannya menjadi efisien.

Dari lima subsektor pada sektor pertanian yang merupakan sektor basis dalam perekonomian Provinsi Bali, teridentifikasi tiga subsektor basis yaitu: subsektor tanaman bahan makanan, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan subsektor perikanan. Berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan

sebelumnya, para perencana dapat memprioritaskan investasi ke subsektor perikanan, baik perikanan laut, perikanan air payau atau darat, karena Provinsi Bali yang dilindungi oleh laut memiliki potensi besar di bidang perikanan, produk subsektor perikanan orientasi ekspor (tuna, kerapu, udang, ikan hias hidup, ikan kaleng) yang menghasilkan devisa bagi negara, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, infrastruktur penunjang tersedia memadai seperti pelabuhan udara, dermaga laut, jalan, dan penunjang lainnya seperti laboratorium perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali. Berikutnya investasi dapat diarahkan atau dialokasikan ke subsektor peternakan, karena produk subsektor ini sebagian dibutuhkan oleh masyarakat umum dan pariwisata seperti daging ayam, daging sapi, telur dan produk peternakan lainnya, dan sebagian lagi diantar pulaukan, seperti sapi hidup dikirim ke Jakarta, telur ayam dikirim ke kota-kota di Nusa Tenggara Barat seperti Mataran dan Sumbawa.

Namun patut pula diingat bahwa anjuran investasi ke subsektor perikanan dan peternakan harus disertai dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif oleh pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten, sehingga investor tertarik berinvestasi di dua subsektor ini. Kompas, Senin 29 Agustus 2005 halaman 18 menurunkan berita dengan *headline* "Iklim Investasi di Sektor Perikanan Mencemaskan". Berita yang bersumber dari wawancara empirik dengan beberapa pengusaha perikanan asing, menyoroti beberapa hal dalam kaitan dengan investasi, yaitu: (1) kepastian hukum dijalankan setengah hati; (2) Biaya tinggi ekonomi semakin meresahkan; (3) Tarif listrik dan harga bahan bakar minyak memberatkan; (4) Jatuhnya nilai tukar rupiah atas dollar AS yang sulit diprediksi; (5) Kelompok tertentu (mafia) monopoli produk tertentu; dan (6) Ada aksi teror dan perusakan pabrik. Jadi jika pemerintah serius meningkatkan investasi di subsektor perikanan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Bali khususnya, maka aspek-aspek yang kurang mendukung ini harus disingkirkan atau dikurangi, sehingga investor tidak hengkang dari Indonesia dan bahkan dapat menarik lebih banyak investor asing.

Investasi pemerintah yang berkisar sekitar 40% dari total investasi yang dibutuhkan setiap tahun dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang yang dianggap belum memadai seperti penyediaan jaringan listrik, air minum, dermaga perikanan yang lebih luas dan memadai dll. Sedangkan investasi

swasta dapat langsung diinvestasikan untuk pembangunan industrinya, seperti pembelian kapal, pabrik penganlengan, dsb.

Subsektor basis lainnya pada sektor pertanian dalam arti luas adalah subsektor tanaman bahan makanan yang memegang peranan penting dalam penyediaan pangan. Pemberdayaan subsektor ini dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti hortikultura dan sayur-mayur yang dibutuhkan oleh hotel dan restoran, di samping akan mampu meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha produsennya, juga akan meningkatkan ketahanan pangan daerah Bali. Jadi jika tersedia dana yang bersumber dari pemerintah atau swasta juga dapat diarahkan agar dialokasikan ke subsektor ini, karena subsektor tanaman bahan makanan sangat menjajikan keuntungan bagi suatu investasi.

Jika menggunakan terminologi saat ini yakni agribisnis sebagai pengganti terminologi pertanian, maka ketiga subsektor basis yaitu tanaman bahan makanan, peternakan dan hasil-hasilnya, dan perikanan adalah motor penggerak agribisnis Daerah Bali, menyangkut subsistem agroindustri hulu sebagai penyedia masukan dan agroindustri hilir sebagai pengguna keluaran atau output, yang terkait erat dengan kepariwisataan di Provinsi Bali. Bila di masa-masa yang akan datang perekonomian bertambah baik sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan penduduk pasti akan terus bertambah secara absolut, maka permintaan akan produk-produk agribisnis akan meningkat dan ini dapat direspon dengan meningkatkan pasokan melalui peningkatan investasi, baik investasi swasta maupun dari investasi pemerintah.

3.2.4.2. Kebutuhan Investasi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Dari tiga subsektor yang menyusun sektor perdagangan, hotel dan restoran, hanya dua subsektor teridentifikasi sebagai subsektor basis yaitu subsektor hotel dan subsektor restoran. Oleh karena itu, jika tersedia dana investasi sesuai dengan proyeksi kebutuhan sektor ini periode 2005-2010, agar diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan setiap tahun ke kedua subsektor basis ini karena keduanya terkait langsung dengan kunjungan wisatawan ke Bal. Dengan kata lain kedua subsektor ini menciptakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang keberadaan sangat vital dalam mendukung kepariwisataan suatu daerah tujuan wisata, seperti halnya daerah tujuan wisata Bali.

Namun untuk investasi di subsektor perhotelan, sebaiknya pemerintah Provinsi Bali mengarahkan investasi di luar tiga kabupaten/Kota yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar, karena ketiga kabupaten/kota tersebut kamar-kamar hotel tersedia berlebihan (*oversupply*) dibandingkan dengan permintaan. Hal ini dijustifikasi: (1) Jumlah penyedia jasa hotel di tiga kabupaten/kota tersebut sudah sangat banyak bahkan mendekati jenuh. Disparda Bali (2002) menginformasikan bahwa tingkat hunian kamar hotel melati di Bali yang sebagian besar berada di tiga kabupaten Badung, Denpasar dan Gianyar tahun 2002 rata-rata hanya 28,62%; (2) Di luar tiga kabupaten/kota tersebut masih tersedia peluang investasi lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya, bahkan harga lahan relatif lebih murah; (3) Mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara wilayah maju dan terbelakang.

Penyebaran investasi hotel atau prasarana pariwisata di luar ketiga kabupaten tersebut juga dalam usaha pemeratakan perkembangan kepariwisataan ke seluruh kabupaten di Bali, sehingga tetesan madu kepariwisataan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Bali. Sedangkan investasi di subsektor restoran di mana saja dapat dialokasikan sepanjang dipandang layak oleh investor.

3.2.4.3. Kebutuhan Investasi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor basis pengangkutan dan komunikasi terdiri dari dua subsektor dan dari keduanya, hanya subsektor pengangkutan yang teridentifikasi sebagai subsektor basis (tabel 4.1). Jika subsektor mengangkutan dibagi menjadi angkutan umum dan angkutan wisata, maka pengangkutan umum di samping produksinya berupa jasa angkutan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bali sendiri, juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luar Bali, baik yang datang ke Bali maupun pulang dari Bali. Contohnya banyak perusahaan bus antar provinsi yang berbasis di Bali dengan trayek ke berbagai kota di Pulau Jawa. Jika perkembangan perekonomian nasional semakin baik, pasti lalu lintas orang dan barang antar provinsi di Indonesia semakin meningkat, maka kebutuhan jasa angkutan umum akan semakin meningkat pula, sehingga kebutuhan investasi di bidang ini juga semakin meningkat. Angkutan wisata di Bali ditujukan melayani kebutuhan wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Bali atau

diistilahkan eksportir jasa angkutan yang konsumennya yaitu wisatawan asing dan domestik datang membeli ke Bali.

Jadi pengembangan subsektor basis pengangkutan melalui investasi memiliki prospek cerah, karena Bali merupakan daerah lintasan antara beberapa provinsi di Indonesia dan daerah tujuan wisata terfavorit di dunia, sehingga peningkatan lalu lintas barang dan kunjungan wisatawan ke Bali di tahun-tahun mendatang, sudah pasti akan membutuhkan produksi jasa pengangkutan yang semakin meningkat pula. Oleh karena itu, jika dana investasi tersedia yang besarnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan setiap tahun, maka perencanaan pembangunan di daerah Bali dapat mengarahkannya ke subsektor ini.

3.2.4.4. Kebutuhan Investasi Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa terdiri atas dua subsektor yaitu subsektor jasa pemerintahan umum dan jasa swasta, keduanya teridentifikasi sebagai subsektor basis. Jika tersedia dana investasi sesuai dengan kebutuhan setiap tahun periode 2005-2010 dapat dialokasikan ke kedua subsektor tersebut, baik secara berimbang maupun ada prioritas-prioritas ke salah satu subsektor basis. Subsektor jasa pemerintahan umum menyangkut jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya. Sedangkan subsektor jasa swasta menyangkut jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi dan jasa perumahan dan rumahtangga.

Dari perbandingan antara skenario-1 dan skenario-2 terungkap jelas bahwa terdapat perbedaan target-target pertumbuhan sektor-sektor basis setiap tahun periode 2005-2010 antara kedua skenario tersebut. Target pertumbuhan sektor basis setiap tahun pada skenario-2 lebih tinggi dari pada skenario-1, menimbulkan konsekuensi kebutuhan dana investasi setiap tahun lebih tinggi pula. Jadi, semakin tinggi rencana ekonomi memasang target pertumbuhan pada tahun ke-t, maka semakin tinggi dana investasi yang dibutuhkan pada tahun ke-t, dan semakin tinggi pula pengembalian investasi (*return*) pada tahun ke-(t+n). Masalahnya sekarang, target pertumbuhan mana yang diinginkan oleh para perencana pembangunan di tingkat provinsi. Jika target pertumbuhan sektor basis yang lebih rendah diinginkan para perencana pembangunan, maka investasi yang dibutuhkan juga lebih rendah. Sedangkan jika target pertumbuhan lebih tinggi

diinginkan para perencana pembangunan, maka dibutuhkan investasi yang lebih besar.

Dalam kondisi krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS semakin merosot (Rp 10.876 per dollar AS, Selasa 30 Agustus 2005), harga BBM di pasar internasional yang masih bertengger di atas level Rp 65 dollar per barrel (Kompas, Rabu 31 Agustus 2005 US 70 AS per barrel) yang membengkakkan defisit APBN 2005, anggaran pemerintah untuk pembangunan yang semakin terbatas dan kepercayaan investor luar negeri yang belum sepenuhnya pulih, maka dana-dana investasi baik yang bersumber dari pemerintah maupun investor swasta semakin terbatas. Oleh karena itu, para perencana pembangunan di Provinsi Bali dapat memilih target pertumbuhan sektor yang lebih rendah, sehingga kebutuhan dana investasi relatif lebih kecil.

3.2.4.5. Kebutuhan Total Investasi Perekonomian Regional Bali

Kebutuhan total investasi perekonomian Bali merupakan penjumlahan kebutuhan investasi semua sektor atau penjumlahan kebutuhan investasi sektor-sektor basis dan sektor-sektor non basis. Jika dibandingkan antara kedua skenario, tampak bahwa kebutuhan total investasi untuk seluruh sektor dalam perekonomian Bali lebih besar pada skenario-2 dari pada skenario-1. Hal ini disebabkan pada skenario-2 target pertumbuhan sektor-sektor basis (pertanian, perdagangan-hotel-restoran, pengangkutan-komunikasi, dan jasa-jasa) lebih tinggi dari pada skenario-1 yang hanya menggunakan proyeksi *trend linear*. Jadi jika Pemerintah Provinsi Bali menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar mampu menciptakan kesempatan kerja lebih banyak, maka membutuhkan investasi lebih tinggi. Sedangkan jika menginginkan pertumbuhan ekonomi sedang-sedang (moderate), maka membutuhkan investasi lebih rendah.

Hasil perhitungan kebutuhan investasi yang diperoleh tampaknya realistis, baik pada skenario-1 maupun skenario-2 jika dibandingkan dengan data historis Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (realisasi total investasi) pada PDRB Bali dari sisi penggunaan periode 1999-2003 menurut harga konstan 1993, berturut-turut sebesar Rp 1316931,66 juta (1999), Rp 1334620,32 juta (2000), Rp 1341412,80 juta (2001), Rp 1335779,94 juta (2002), Rp 1368165,68 juta (2003). Sedangkan kebutuhan investasi periode 2005-2010 seperti telah disinggung sebelumnya lebih tinggi dari pada realisasi investasi tahun 2003, dan cenderung

meningkat secara perlahan, yaitu sebesar Rp 1645617,28 juta (2005), Rp 1908279,94 juta (2006), Rp 2222927,85 juta (2007), Rp 2605284,29 juta (2008), Rp 3076050,63 juta (2009), dan Rp 3662854,34 juta. Jadi realistik dan logisnya perhitungan ini terletak pada kecenderungan yang meningkat secara perlahan, antara realisasi investasi periode 1999-2003 dengan proyeksi kebutuhan investasi periode 2005-2010.

Dalam kaitan realistik tidaknya suatu perhitungan kebutuhan investasi, Basri (2004) sempat mempertanyakan perkiraan kebutuhan investasi Indonesia sebesar Rp 379,8 triliun untuk tahun 2004 dan Rp 471,4 triliun untuk tahun 2005 yang dibuat sekelompok ekonom dan diberitakan di berbagai media masa. Realistiskah kebutuhan investasi itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5% tahun 2004 dan 5,5% tahun 2005?. Dibandingkan dengan data investasi nominal tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Bappenas sebesar Rp 285,12 triliun (Kompas, 19/3), Basri menganggap perkiraan kebutuhan investasi tahun 2004 dan 2005 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5% dan 5,5,% dianggap tidak realistik atau tidak logis karena dianggap *overestimate*, yaitu peningkatan nilai investasi nominal yang sangat besar untuk tahun 2004 dan 2005 dibandingkan dengan nilai investasi nominal tahun 2003.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sembilan sektor dalam perekonomian Provinsi Bali, hanya empat sektor teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjukkan oleh nilai LQ (rata-rata 6 tahun) > 1 , yaitu sektor pertanian (LQ = 1,18), sektor perdagangan, hotel dan restoran (LQ = 1,94), sektor pengangkutan dan komunikasi (LQ = 1,69), dan sektor jasa-jasa (LQ = 1,56). Sedangkan lima sektor adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ < 1 , yaitu: sektor pertambangan dan penggalian (LQ = 0,08), sektor industri pengolahan (LQ = 0,33), sektor listrik, gas dan air bersih (LQ = 0,91), sektor bangunan (LQ = 0,75), dan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan (LQ = 0,94).

2. Berdasarkan ICOR, target pertumbuhan dan nilai tambah bruto (PDRB) sektor-sektor basis sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}), maka dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis dan kebutuhan total investasi untuk perekonomian Provinsi Bali sebagai berikut:

a. Skenario-1:

1. Kebutuhan investasi sektor pertanian periode 2005-2010 berturut-turut Rp 227660,58 juta (2005); Rp 262894,10 juta (2006); Rp 302217,01 juta (2007); Rp 346374,04 juta (2008); Rp 396235,35 juta (2009) dan Rp 452822,84 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 1988203,93 juta atau 1,988 triliun.
2. Kebutuhan investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran periode 2005-2010 berturut-turut Rp 133429,39 juta (2005), Rp 110644,27 juta (2006), Rp 87204,66 juta (2007), Rp 63235,82 juta (2008), Rp 38868,31 (2009) juta, dan Rp 14236,83 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 447619,28 juta atau Rp 447,619 milyar.
3. Kebutuhan investasi sektor pengangkutan dan komunikasi periode 2005-2010 berturut-turut Rp 239636,39 juta (2005), Rp 277659,86 juta (2006), Rp 320010,27 juta (2007), Rp 367486,98 juta (2008), Rp 421022,76 juta (2009), dan Rp 481712,02 juta (2010), atau kebutuhan total investasi selama enam tahun Rp 2107528,29 juta atau Rp 2,108 triliun.
4. Kebutuhan investasi sektor jasa-jasa periode 2005-2010 berturut-turut Rp 337103,91 juta (2005), Rp 392065,64 juta (2006), Rp 454163,76 juta (2007), Rp 524787,43 juta (2008), Rp 605584,36 juta (2009), dan Rp 698519,31 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 3012224,40 juta atau Rp 3,012 triliun.
5. Kebutuhan investasi total empat sektor-sektor basis periode 2005-2010 berturut-turut Rp 937830,27 juta (2005), Rp 1043263,87 juta (2006), Rp 1163595,70 juta (2007), Rp 1301884,27 juta (2008), Rp 1461710,78 juta (2009), dan Rp 1647291,00 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 7555575,90 juta atau Rp 7,6 triliun.

6. Kebutuhan total investasi untuk perekonomian Bali periode 2005-2010 berturut-turut Rp 1645617,28 juta (2005), Rp 1908279,94 juta (2006), Rp 2222927,85 juta (2007), Rp 2605284,29 juta (2008), Rp 3076050,63 juta (2009), dan Rp 3662854,34 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 15121014,33 juta, atau Rp 15,121 triliun. Kebutuhan total investasi nominal ini untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi berturut-turut sebesar 4,17% (2005), 4,64% (2006), 5,16% (2008), 5,74% (2008), 6,39% (2009), dan 7,13% (2010), atau pencapaian nilai tambah bruto (PDRB) berturut-turut sebesar Rp 8984615.56 juta (2005), Rp 9401324.09 juta (2006), Rp 9886205.27 juta (2007), Rp 10453445.33 juta (2008), Rp 11121486.84 juta (2009) dan Rp 11914434.08 juta (2010).

b. Skenario-2:

1. Kebutuhan investasi sektor pertanian periode 2005-2010 berturut-turut Rp 279007,48 juta (2005), Rp 321112,24 juta (2006), Rp 368743,89 juta (2007), Rp 422920,88 juta (2008), Rp 484848,58 juta (2009), Rp 555959,70 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 2432592,76 juta, atau Rp 2,432 triliun.
2. Kebutuhan investasi sektor perdagangan, hotel dan restoran selama periode 2005-2010 berturut-turut Rp 453553,41 juta (2005), Rp 536488,89 juta (2006), Rp 627692,01 juta (2007), Rp 728820,16 juta (2008), Rp 841787,29 juta (2009), Rp 968820,64 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 4157162,41 juta, atau Rp 4,157 triliun.
3. Kebutuhan investasi sektor pengangkutan dan komunikasi periode 2005-2010 berturut-turut Rp 276507,30 juta (2005), Rp 319365,93 juta (2006), Rp 367561,15 juta (2007), Rp 422082,72 juta (2008), Rp 484096,41 juta (2009), dan Rp 554981,96 juta (2010), total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 2424595,47 juta, atau Rp 2,425 triliun.

4. Kebutuhan investasi sektor jasa-jasa periode 2005-2010 berturut-turut Rp 359681,52 juta (2005), Rp 413960,74 juta (2006), Rp 475364,91 juta (2007), Rp 545206,99 juta (2008), Rp 625040,87 juta (2009), dan Rp 716713,53 juta (2010), atau total investasi selama enam tahun Rp3135968,55 juta, atau Rp 3,136 triliun.
5. Kebutuhan investasi total empat sektor basis periode 2005-2010 berturut-turut 1368749,71 juta (2005), Rp 1590927,80 juta (2006), Rp 1839361,96 juta (2007), Rp 2119030,75 juta (2008), Rp 2435773,15 juta (2009), Rp 2796475,83 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 12150319,19 juta, atau Rp 12,150 triliun.
6. Kebutuhan total investasi untuk perekonomian Bali periode 2005-2010 berturut-turut Rp 2076536,72 juta (2005), Rp 2455943,87 juta (2006), Rp 2898694,10 juta (2007), Rp 3422430,76 juta (2008), Rp 4050113,00 juta (2009), dan Rp 4812039,18 juta (2010), atau total kebutuhan investasi selama enam tahun Rp 19715757,63 juta, atau Rp 19,716 triliun. Kebutuhan total investasi nominal ini untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi berturut-turut sebesar 5,20% (2005), 5,84% (2006), 6,50% (2007), 7,18% (2008), 7,91% (2009), dan 8,69% (2010), atau pencapaian nilai tambah bruto (PDRB) berturut-turut sebesar Rp 9148515.16 juta (2005), Rp 9682518.90 juta (2006), Rp 10311423.57 juta (2007), Rp 11052299.18 juta (2008), Rp 11926968.25 juta (2009) dan Rp 12963504.05 juta (2010).

4.2. Rekomendasi Kebijakan

1. Dalam rangka perencanaan makro regional Provinsi Bali, sebaiknya Pemerintah Provinsi Bali cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali menerapkan prinsip-prinsip perencanaan makro secara ilmiah. Artinya perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat, metode dan peralatan analisis ilmiah, sehingga menghasilkan rencana (program dan kegiatan) yang layak diterapkan untuk mencapai tujuan dan target-target perencanaan secara tepat.
2. Sumberdaya investasi yang semakin terbatas, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri, agar alokasinya diprioritaskan untuk

pengembangan sektor-sektor basis, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, terutama subsektor tanaman pangan, peternakan dan perikanan; Sektor perdagangan, hotel dan restoran, terutama subsektor hotel dan subsektor restoran; Sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa terutama subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta. Keempat sektor basis ini terkait erat dengan pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian Bali.

3. Pemerintah Kabupaten Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten di Bali perlu melakukan analisis sektor-sektor basis dalam perekonomian daerah masing-masing. Ini berkaitan dengan rencana alokasi sumberdaya investasi Pemerintah Provinsi Bali ke sektor-sektor basis di setiap kabupaten di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. 'Ekonomi Pembangunan'. Edisi keempat, BPFE Yogyakarta
- Azis, Iwan Jaya. 1994. 'Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia'. Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Basri, Mohammad Chatib. 2004. Kebutuhan Investasi: Realistiskah?. Dalam Kompas, Selasa 23 Maret 2004. Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. Regional and Local Economic Analysis for Practitioners. Praeger Publisher, New York and London, Fourth Edition.
- Disparda Bali. 2002. Survei Tingkat Hunian Hotel tahun 2002 di Bali. Dinas Pariwisata Propinsi Bali.
- Hoover, Edgar M. 1975. 'An Introduction to Regional Economics. Alfred A. Knopf, New York, Second Edition.
- Kadariah. 1981. 'Ekonomi Perencanaan'. Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kompas. 2005. Iklim Investasi di Sektor Perikanan Mencemaskan. Dalam Kompas Senin 29 Agustus 2005, Hal. 18. Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.